

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 2022

OPD : DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program: Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraari, kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Kordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	- Undang - Undang Nomor : 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. - Berdasarkan data pada tahun 2020 Jumlah UMKM di pesisir selatan = 8.661UMKM yang terdiri dari IKM sebanyak 2.503 IKM yang dibagi menjadi 5 (lima) klasifikasi industri : Industri Sandang dan Kulit 280 IKM, Industri Pangan 1051, Industri Kerajinan 156, Industri Kimia dan Bangunan 913 IKM, Industri Logam dan elektronik 103 IKM. - Pada saat ini masyarakat/ konsumen sudah mulai cerdas dalam menentukan produk yang digunakan	Akses : - Kurangnya informasi tentang halal, Legalitas Merek Dagang (HKI) dan Izin edar bagi Pelaku IKM - Kurangnya pengetahuan pelaku IKM tentang diversifikasi produk potensi daerah Partisipasi : - Kurangnya partisipasi pelaku IKM dalam pengurusan Sertifikat Halal, legalisasi merek dagang (HKI) dan Izin edar - Kurangnya partisipasi pelaku IKM dalam pengembangan produk, diversifikasi dan inovasi produk	1. Masih rendahnya alokasi anggaran khususnya untuk pembinaan, pengawasan dan fasilitasi Halal dan HKI produk IKM. 2. Pelaku IKM yang dibina tersebar dan daerahnya luas. 3. Jumlah SDM bidang perindustrian kurang/sedikit untuk memberikan pembinaan dan pengawasan produk IKM 4. Untuk industri kimia dan bahan bangunan tertentu, masalah gender masih	1. Jarak tempuh dari lokasi IKM ke lokasi Dinas/Kantor Pengelola legalitas yang jauh. 2. Usaha yang dikelola IKM merupakan usaha sampingan sehingga mereka menganggap legalitas usaha tidak terlalu penting 3. Kurangnya informasi akan pentingnya legalitas usaha bagi IKM. 4. Pimpinan dari IKM lebih sering mengirim pegawainya dalam acara sosialisasi sehingga informasi yang diberikan tidak tepat sasaran. 5. Minimnya pelatihan untuk mengupgrade wawasan	Meningkatnya kualitas dan varian produk IKM yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan.	- Melakukan pembinaan sekaligus pendataan produk-produk yang layak untuk mendapatkan Sertifikat Halal dan HKI (Pendaftaran Merk), Berpotensi mendapatkan Izin edar MD BPOM - Melakukan pembinaan sekaligus pendataan jenis produk baru IKM yang masih bisa dikembangkan dan potensial dari sisi bahan baku maupun kemampuan tenaga kerja - Melakukan pengawasan terhadap pengolahan produk IKM. - Melakukan sosialisasi tentang Sertifikat Halal dan Izin edar MD BPOM	- Data pada tahun 2020 jumlah IKM di Pesisir Selatan berjumlah 2.503 IKM yang dibagi menjadi 5 (lima) klasifikasi industri : Industri Sandang dan Kulit 280 IKM, Industri Pangan 1051, Industri Kerajinan 156, Industri Kimia dan Bangunan 913 IKM, Industri Logam dan elektronik 103 IKM. Pada saat ini masyarakat/ konsumen sudah mulai cerdas dalam menentukan produk yang digunakan atau	- Jumlah IKM yang dibina. - Jumlah IKM yang diawasi. - Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi. - Jumlah IKM yang dievaluasi untuk pengurusan sertifikasi halal dan HKI. - Jumlah IKM yang difasilitasi - Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan diversifikasi produk - Jumlah inovasi/ diversifikasi produk

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan varian produk UMK	atau dikonsumsi. Legalitas produk salah satu penentu mutu produk, misalnya sertifikasi halal, legalitas merk dagang (HKI), izin edar produk (MD/ P-IRT), SNI untuk produk tertentu serta kandungan nilai gizi yang terdapat pada produk. - Kemudian legalisasi Industri berupa Izin Usaha Industri (IUI) juga dituntut bagi IKM. Izin Usaha Industri (IUI) diwajibkan untuk menjamin keberadaan IKM tersebut diterima baik secara lingkungan (tidak mencemari lingkungan) serta lokasi yang memenuhi kriteria perencanaan tata ruang dan wilayah - Dari 2.503 IKM tersebut	Kontrol : - Perlunya pemahaman kepada pelaku IKM terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal, Legalisasi Merk Dagang (HKI) serta Izin Edar guna melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk itu sendiri. - Perlunya upgrade wawasan pelaku IKM mengenai pengembangan produk, diversifikasi dari inovasi produk Manfaat: - Dengan adanya legalitas produk : 1. Sertifikat Halal dan Izin Edar : - Kenyamanan dan keamanan konsumen	dipertimbangkan	pelaku IKM dalam diversifikasi produk		- Melakukan evaluasi terhadap IKM yang mendapatkan sosialisasi tersebut. - Memfasilitasi pengurusan Sertifikat Halal dan HKI.	dikonsumsi. Legalitas produk salah satu penentu mutu produk, misalnya sertifikasi halal, legalitas merk dagang (HKI), izin edar produk (MD/ P-IRT), SNI untuk produk tertentu serta kandungan nilai gizi yang terdapat pada produk. - Kemudian legalisasi Industri berupa Izin Usaha Industri (IUI) juga dituntut bagi IKM. Izin Usaha Industri (IUI) diwajibkan untuk menjamin keberadaan IKM tersebut diterima baik secara	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
	yang memiliki sertifikat halal hanya 37 produk, legalitas merek (HKI) yang sudah terbit dan masih berlaku hanya 1 merek. Sedangkan untuk SNI belum ada produk SNI wajib serta 5 produk berinformasi nilai gizi. - Penerima manfaat produk IKM adalah masyarakat dari semua kalangan baik perempuan, laki-laki, anak-anak, tua dan muda.	akan meningkat. - Daya beli masyarakat meningkat. - Omset meningkat - Memperluas Market share 2. Legalitas merek Dagang (HKI) - Mempunyai brand sendiri dan tidak ada yang bisa menyamai dengan brand yang lain. - Merk dan produk bisa dikenal luas oleh masyarakat. - Omset meningkat - Dengan adanya pelatihan diversifikasi produk pangan : 1. Meningkatnya jumlah varian produk yang beredar di pasaran 2. Omset IKM meningkat					lingkungan (tidak mencemari lingkungan) serta lokasi yang memenuhi kriteria perencanaan tata ruang dan wilayah - Dari 2.503 IKM tersebut yang memiliki sertifikat halal hanya 37 produk, legalitas merek (HKI) yang sudah terbit dan masih berlaku hanya 1 merek. Sedangkan untuk SNI belum ada produk SNI wajib serta 5 produk berinformasi nilai gizi. - Penerima manfaat produk IKM adalah masyarakat dari	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
		3. Memperluas segmen pasar dari market share					semua kalangan baik perempuan, laki-laki, anak-anak, tua dan muda.	

Painan, Maret 2021
Kepala Dinas Koperasi, UMKM,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan



Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2022

OPD : DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- Line)	Indikator Gender
Program : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Sub Kegiatan : Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Tujuan : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian - Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi. - Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. - Berdasarkan data keragaan koperasi tahun 2020, jumlah koperasi yang ada di Kab. Pesisir Selatan sebanyak 315 unit, koperasi aktif sebanyak 145 unit dan sisanya merupakan koperasi tidak aktif. - Dari 145 unit koperasi tersebut,	Akses : 1. Kurangnya partisipasi perempuan dalam manajemen koperasi. 2. Kepengurusan koperasi didominasi oleh laki-laki Partisipasi : 1. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Kontrol : Penilaian kinerja koperasi belum berbasis gender. Manfaat: Pengurus koperasi belum menyadari sepenuhnya manfaat dari kegiatan pembinaan dari	1. Keterbatasan jumlah SDM Bidang koperasi dalam memberikan pembinaan dan pengawasan koperasi. 2. Masih rendahnya alokasi anggaran, khususnya untuk pembinaan, pengawasan koperasi. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi. 4. Kurangnya informasi dalam pengarusutamaan gender di lingkungan koperasi,	1. Masih rendahnya pemahaman Pengurus, Pengawas dan anggota koperasi tentang perkoperasian. 2. Rendahnya kesadaran anggota dalam berkoperasi 2. Masih kuatnya budaya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. 3. Kurangnya pemahaman terhadap konsep gender.	Melakukan penilaian kinerja koperasi yang berbasis gender • Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi yang memperhatikan partisipasi laki- laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan di koperasi. • Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk menjadi Pengurus Koperasi.	1. Melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi serta memberikan pemahaman kepada anggota koperasi khususnya perempuan untuk pengkaderan menjadi pengurus koperasi. 2. Melakukan penilaian kinerja koperasi yang berbasis gender.	- Jumlah koperasi aktif = 145 unit - Jumlah Pengurus Koperasi laki-laki = 80% - Jumlah Pengurus Koperasi perempuan = 20%	1. Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap Pengurus Koperasi yang laki-laki dan perempuan. 2. Jumlah kriteria penilaian kinerja koperasi yang melihat kepada aspek gender mulai dari keanggotaan koperasi, pengurus, manajer dan pengawas.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- Line)	Indikator Gender
	yang menjadi Pengurus Koperasi didominasi oleh laki-laki sekitar $\pm$ 80%, sedangkan perempuan hanya sebesar 20%.	pengawasan koperasi yang sudah dilaksanakan.						

Painan, Maret 2021
Kepala Dinas Koperasi, UMKM,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan


Drs. A. Z. R. A. L.
NIP. 19621231 198602 1 039